

BAB I

PENDAHULUAN

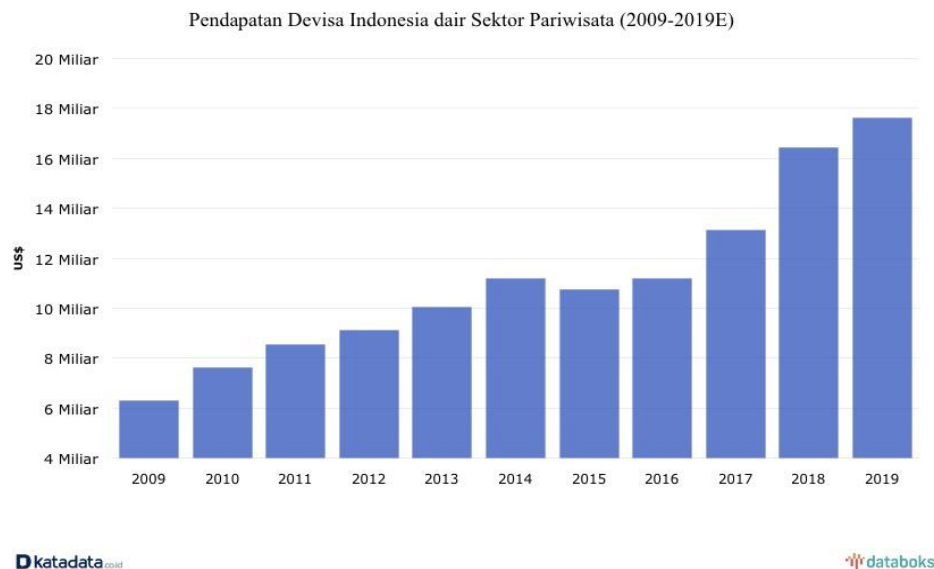
1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini merupakan isu yang sangat penting bagi sebuah negara karena berhubungan dengan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat. Negara dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi negaranya. Ali Ibrahim Hasyim menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Hubungan timbal balik ini dapat diperoleh dengan pemerintah melakukan program-program yang mengembangkan kegiatan ekonomi ditengah masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Hasyim, 2017).

Melalui sumber daya alam yang tersedia diharapkan dapat berimplikasi dalam meningkatkan devisa negara. Dalam UU Nomor 32 Tahun 1964, devisa negara adalah saldo dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia, juga dapat diartikan sebagai nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing dan diakui secara global oleh negara lainnya. Devisa negara dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti ekspor, penerimaan devisa dari luar negeri, investasi, bea cukai dan khususnya pariwisata sebagai sumber devisa negara terbesar. Tahun 2018, angka devisa negara meningkat mencapai USD 120,7 miliar (KemenKeu-RI, 2019) dan pariwisata memberikan kontribusi sebanyak USD 16,426 miliar atau sebanyak 7,3% dari bagian seluruh devisa negara (Badan Pusat Statistik, 2019). Hal ini membuktikan

bahwa pariwisata di Indonesia memiliki potensi sehingga dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata di dunia ataupun internasional.

Gambar 1.1: Sumber Devisa Negara dari Pariwisata



Sumber: (Kata Data, 2020)

Menurut Yakup (2019:2), pariwisata dinilai sebagai suatu asset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi objek wisata. Pariwisata telah menjadi salah satu kontribusi utama bagi pertumbuhan ekonomi di dunia, baik negara berkembang dan negara maju. Pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur termasuk pendapatan mata uang asing, menarik investasi internasional, meningkatkan pendapatan pajak dan menciptakan lapangan pekerjaan (Yakup, 2019:5)

Pariwisata memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi global, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan pada daerah tujuan wisata (Brida dalam (Yakup, 2019). Selain itu, pengaruh yang dapat diberikan oleh pariwisata secara langsung yaitu dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak serta mampu memberikan kontribusi bagi penduduk sekitarnya untuk

meningkatkan perekonomian. Tiap negara harus memperlihatkan daya jual akan keindahan alam, budaya sosial yang dimiliki guna menarik minat wisatawan mancanegara, karena melalui pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi negara tersebut (Huda, 2020: 161).

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang dan menghabiskan waktu senggang (Koen Mayers, dalam (Suwena & Widyatmaja, 2017;16). Goeldner & Ritchie dalam (Ariza & Yusendra, 2016:66) mengatakan pendapat yang sama yakni pariwisata merupakan kegiatan dari orang-orang yang mengunjungi tempat tertentu untuk jalan-jalan, mengunjungi teman dan kerabat, mengambil liburan, dan bersenang-senang serta kegiatan-kegiatan professional lainnya. Pariwisata juga menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat sebagai hiburan dan rekreasi.

Pariwisata alam memiliki konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang meliputi 3 aspek yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan alam. Pariwisata memberi sumbangan kepada pencapaian tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor satu (1) dimana pariwisata bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat lokal. Peningkatan pendapatan dapat diperoleh ketika masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGS) yaitu meliputi 1) *People*, 2) *Planet*, 3) *Prosperity*, 4) *Peace*, & 5) *Partnership*, dijelaskan bahwa tujuan pengentasan kemiskinan dari pariwisata

dikategorikan dalam prinsip *People* yang menyebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan.(Rachmatullah et al., 2021)

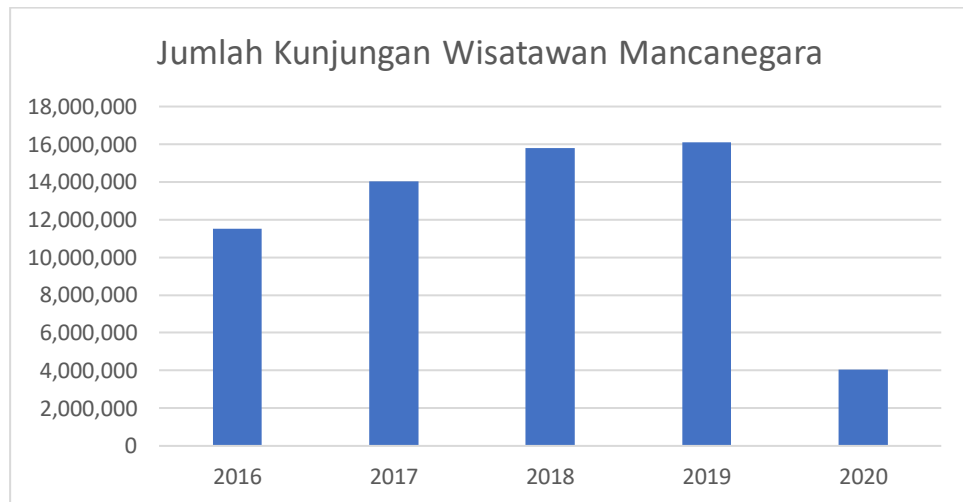
Setiap negara tentu memiliki daya tarik dan pesona tersendiri bagi calon pengunjung. Urutan negara terbanyak dikunjungi pada tahun 2019, yaitu Perancis, Spanyol, dan Amerika Serikat. Perancis merupakan negara paling banyak dikunjungi nomor satu di dunia dengan jumlah wisatawan mencapai 89 juta per tahun. Perancis mampu menjual pariwisata negaranya dengan kemewahan yang berkelas, keindahan desa dan kota yang romantis, serta menjual budayanya seperti kastil, villa dan katedral bangsawan serta sejarah kerajaan yang dimiliki. Kedua, Spanyol sebagai negara kedua yang paling banyak dikunjungi sebanyak 83 juta pengunjung per tahun. Spanyol memiliki keindahan alam dan tempat-tempat eksotis yang menawan, bangunan-bangunan sejarah yang megah, pantai dan pegunungan yang indah, wisata kuliner serta wisata belanja yang dapat memikat wisatawan. Terakhir, ada Amerika Serikat sebagai negara ketiga paling banyak dikunjungi yaitu sebanyak 80 juta pengunjung per tahun. Amerika dengan segala pesona metropolis dan kemewahannya, *city shopping* dan *road tripping* serta suasana kota yang seperti tidak pernah padam, budaya dan kuliner yang kuat menjadi tujuan wisatawan berkunjung ke Amerika (Supriyanto, 2020)

Tak kalah dengan potensi alam yang dimiliki oleh ketiga negara tersebut, Indonesia juga memiliki potensi kekayaan alamnya yang menarik. Potensi pariwisata didukung oleh kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah, keanekaragaman flora dan fauna di setiap daerah. Termasuk keragaman seni dan

budaya yang dimiliki Indonesia di setiap daerah menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke wilayah Indonesia lainnya.

Gambar 1.2 menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2016-2020.

Gambar 1.2: Angka Wisatawan Mancanegara



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik diatas menunjukkan bahwa potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia menjadi daya tarik di dunia global. Sejak tahun 2016 angka wisatawan mancanegara datang ke meningkat setiap tahunnya, terbanyak tahun 2017 hingga mencapai hampir 3 juta pengunjung. Namun, pada tahun 2021 kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan drastis dan signifikan hingga mencapai 75% dikarenakan adanya pembatasan mobilitas guna menahan penyebaran Covid-19 (Badan Pusat Statistik, 2020)

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa pariwisata yang didukung dengan kondisi alam yang baik akan membawa dampak yang positif. Setiap daerah di Indonesia banyak memiliki kekayaan alamnya, seperti pegunungan, danau, laut dan budayanya.

Dalam (Bramana, 2018:1) mengungkapkan, setidaknya Indonesia memiliki 11 provinsi yang dominan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, yaitu Bali, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa barat, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan khususnya Sumatera Utara (BPS, 2015).

Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki potensi alam dan budayanya yang unik. Salah satu potensi alam yang dimiliki yaitu Danau Toba sebagai danau terluas di Indonesia dan Asia Tenggara yang juga merupakan danau terbesar kedua di dunia serta termasuk dalam danau yang terdalam di dunia. Sumatera Utara memiliki keindahan lainnya yakni Panorama Paropo, Kawah Putih Dolok Tinggi Raja, Danau Lau Kwar, dan wisata alam lainnya. Selain pesona alamnya, Sumatera Utara juga masih kuat dengan budaya serta peninggalan-peninggalan sejarah, seperti Museum Istana Maimun, Masjid Raya, Patung Sigale-gale, serta wisata kuliner yang berlimpah.

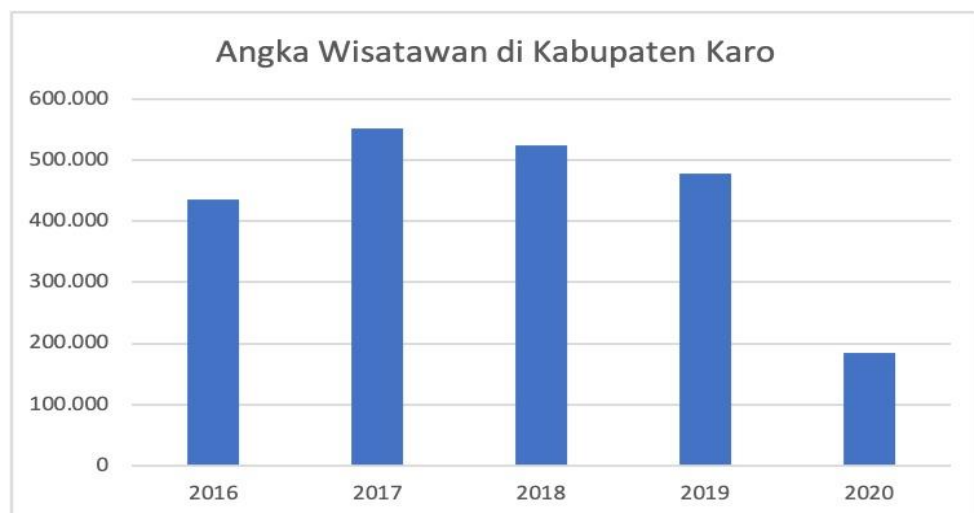
Salah satu daerah pariwisata yang unik di Sumatera Utara adalah Siosar yang berada di Kabupaten Karo, Kecamatan Tigapanah. Bermula dari hutan lindung luas, daerah ini diubah menjadi lahan pengungsian bagi masyarakat yang terdampak dari letusan Gunung Sinabung beberapa tahun lalu dengan melakukan pembangunan hunian tetap. Berada di puncak, kawasan ini menjadi objek wisata suasana dan kondisi alam yang indah dan sejuk. Berada di ketinggian 2000 meter, Siosar dijuluki sebagai Negeri Di Atas Awan versi Kabupaten Karo. Sepanjang perjalanan menuju Siosar, wisatawan akan melewati pemandangan awan dan pepohonan yang hijau serta tempat untuk berfoto yang tersedia di beberapa titik, serta bukit-bukit kecil.

Gambar 1.3: Kawasan Relokasi Siosar



Sumber: (Lathief, 2017)

Gambar 1.4: Angka Kunjungan Wisata di Karo



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, 2022

Kabupaten Karo, salah satu daerah tujuan wisata juga mengalami peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa Siosar masih menjadi pilihan bagi masyarakat Sumatera Utara untuk berwisata. Siosar memiliki daya tarik dan potensi alam meliputi sumber daya alam, lahan-lahan pertanian serta perkebunan dan budaya masyarakatnya. Potensi-potensi tersebut diharapkan akan mendukung dalam proses pengembangan wisata di Siosar. Siosar

sebagai daerah wisata yang baru menjadi ide yang menarik untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan bagi pariwisata alam di Kabupaten Karo.

Gambar 1.5: Kawasan Siosar



Sumber: Mongabay (Resti, 2022)

Selain pemandangan alam, Siosar juga mendirikan beberapa fasilitas layanan publik, seperti sekolah, tempat ibadah, aula, dan sarana publik lainnya. Jenis wisata yang ditawarkan pun beragam, adapun beragam objek wisata yang dapat dinikmati di Siosar, yaitu:

Tabel 1.1: Objek Wisata di Siosar

Objek Wisata	Jenis Wisata
Kebun Madu Efi Siosar	Agrowisata
Puncak 2000 Siosar	Wisata Alam
Relokasi Huntap Siosar	Wisata Alam
Emisura Taman Wisata Puncak Siosar	Agrowisata
Zia Coffee	Wisata Kuliner

Sumber: (seringjalan.com, 2022)

Beberapa destinasi wisata alam di Siosar dapat digambarkan sebagai pariwisata alam yang dinikmati oleh pengunjung, antara lain;

Gambar 1.6: Kebun Madu Efi Siosar



Sumber: (Kusuma, 2021)

Objek wisata yang pertama yaitu ada Kebun Madu Efi Siosar, objek wisata ini menawarkan panorama bukit-bukit hijau, pegunungan dan banyak ditumbuhi bunga-bunga yang menarik untuk dipandang mata. Kebun Madu Efi Siosar menawarkan beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung dimana pengunjung dapat mencicipi madu asli yang diproduksi ditempat, melihat peternakan sapi dan kuda, serta penginapan yang disediakan oleh pengunjung untuk melakukan *camping* serta menikmati *barbeque*, dan beberapa tempat untuk foto yang menarik.

Gambar 1.7 Puncak Siosar 2000



Sumber: (Mohammad, 2022)

Kedua, ada objek wisata Puncak Wisata Siosar 2000. Objek wisata ini menawarkan beberapa tempat atau spot bagi pengunjung untuk berfoto. Tempat untuk berfoto bagi pengunjung ini dibuat dengan pemandangan bukit dan alam hijau sebagai latar belakang untuk berfoto dan ditambah dengan adanya tulisan “Puncak 2000”. Puncak Siosar ini juga mengarah pada Kawasan Relokasi Hunian Tetap masyarakat setempat, sehingga banyak pengunjung yang berhenti untuk dapat berfoto sebelum mereka sampai pada kawasan perumahan.

Gambar 1.8 Taman Wisata Emisura



Sumber: Grace Ginting, 2022

Ketiga, ada Taman Wisata Bunga Emisura, destinasi wisata pegunungan ini menawarkan kualitas udara sejuk dan pemandangan indah Siosar, Kabupaten Karo. Di kelilingi pegunungan, bukit, pepohonan hijau, rerumputan dan berbagai macam bunga destinasi wisata ini memperlihatkan taman bunga yang indah, serta fasilitas lain yang disediakan seperti gazebo, minimarket, *restaurant* dan *coffee shop* serta *spot foto* yang banyak.

Gambar 1.9 Zia Coffee



Sumber: (Utami, 2020)

Terakhir, ada wisata kuliner yang dapat ditemui oleh para wisatawan yaitu Zia Coffee. *Coffee shop* ini menawarkan beberapa jenis makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh pengunjung sambil beristirahat dan memandang pemandangan alam pada sore hari. Semua objek wisata memiliki beberapa titik-titik untuk dapat berfoto. Selain itu, Zia Coffee juga memiliki bangunan atau villa penginapan yang berada tepat disebelahnya yang dinamakan Kacinambun *Highland*. Villa ini juga ramai dikunjungi wisatawan baik untuk menginap maupun sekedar memandang dan berfoto.

Tanggung jawab dalam pengembangan pariwisata merupakan tanggung jawab yang dimiliki bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Tribun (2021), melalui humas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, Bartholomeus Barus mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo terus mengupayakan pengembangan objek pariwisata di Siosar sehingga diharapkan roda ekonomi di daerah sekitarnya dapat bergerak lebih cepat. Masyarakat disekitar pun dapat memanfaatkan peluang secara positif, seperti usaha penginapan, warung makan, dan berjualan sayur dan buah. Tahun 2016, Kabupaten Karo mendapatkan

bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi berupa dua unit bus dengan tujuan Kabanjahe-Siosar, diharapkan dengan adanya bus ini dapat membantu aktivitas masyarakat baik bekerja, berjualan dan menjalankan pendidikan bagi para pelajar di Siosar, serta bagi pengunjung wisatawan (Nasrul, 2018).

Sejarah munculnya daerah wisata Siosar yang unik juga menjadi daya tarik bagi pengunjung. Pembangunan hunian layak huni bagi pengungsi Gunung Sinabung dilakukan melalui tahap pembebasan lahan dan penebangan hutan lindung dan dilakukan banyak kerjasama dengan instansi-instansi lainnya. Dibentuknya Tim Pendampingan Nasional (TPN) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mempercepat penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung yang mengemban tugas memberikan bantuan, fasilitasi, dan pengarahan sumber nasional lainnya guna membantu pemerintah daerah dan masyarakat terkena bencana. Selain itu, TPN juga difokuskan pada pembangunan hunian layak huni, jalan prioritas sepanjang 3km puncak 2000 menuju Siosar serta pengerjaan lahan pertanian seluas 185ha (Admin BNPB, 2015). Kemudian Pemerintah Kabupaten dengan dibantu Pemerintah Pusat melakukan pembangunan kawasan relokasi seperti pembangunan rumah layak huni, aula(jambur), toilet umum, rumah ibadah, gazebo dan fasilitas lainnya bagi masyarakat korban dari erupsi di daerah kawasan Siosar.

Namun, kerjasama yang terjalin antara *stakeholders* yakni BNPB dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana erupsi ini nyatanya belum dapat berjalan beriringan dalam bidang pariwisata di Siosar. Dalam pembangunan pariwisata Siosar pemerintah Kabupaten Karo belum berupaya melakukan pengembangan dan pembangunan secara maksimal. Hal ini terlihat dari hasil

pengembangan pariwisata alam Siosar masih belum dikelola dengan baik. Se jauh ini tempat wisata yang ada di Siosar lebih banyak dikelola oleh pihak swasta dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo masih berperan hanya sebagai pemberi izin kepada mereka yang ingin membuka usaha di Siosar.

Fasilitas yang disediakan juga beberapa sudah mengalami kerusakan dan tidak terawat serta tidak layak lagi digunakan dapat dilihat dari tanaman-tanaman yang tidak terawat dan sampah-sampah berserakan di area wisata. Selain itu, lampu jalan yang tidak tersedia sepanjang menuju Puncak 2000 membuat para pengunjung mengalami kesulitan dalam perjalanan di malam hari. Masalah-masalah yang terjadi menunjukkan bahwa belum ada koordinasi yang tepat sehingga memperlihatkan bahwa fokus pemerintah daerah belum terarah sepenuhnya kepada pengembangan wisata alam Siosar. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antar *stakeholders* belum sepenuhnya berjalan dengan tepat sehingga masalah-masalah ini menjadi suatu kendala berkepanjangan.

Gambar 1.10: Kondisi Jalan Menuju Siosar



Sumber: (Sinulingga, 2020)

Melihat peran pariwisata yang memiliki dampak dan pengaruh yang besar bagi perekonomian, pemerintah seharusnya mampu menjadikan pariwisata sebagai

suatu fokus tersendiri. Namun, dalam mengembangkan pariwisata Siosar, pemerintah belum menjalin kerja sama yang terfokus pada pariwisata Siosar. Dilihat dari penjelasan **Ginting (2018)** dikatakan bahwa dalam pengembangannya, Desa Siosar hanya masih menggunakan Bumdes Siosar dan pengelolaannya pun dilakukan kerjasama antar masyarakat dan organisasi yang ada di Desa Siosar. **Anggy (2020)** juga mengatakan bahwa beberapa objek wisata di Siosar masih dikelola oleh milik pribadi dan masyarakat setempat. Dijelaskan masih kurangnya akses transportasi, kondisi jalan yang bagus tapi tidak dilengkapi dengan pembatas dan lampu jalan. **Rina (2019)** dalam penelitiannya mengatakan kawasan relokasi Siosar belum ideal memenuhi amanat dalam UU No.6 tentang Desa dan terjadinya beberapa masalah dimana sumber daya manusia masih kurang, aset sedikit sehingga menyebabkan pembangunan desa menjadi terhambat, kemandirian desa tidak terwujud dan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud.

Disimpulkan dari beberapa pandangan di atas bahwa dalam pengembangan wisata Siosar masih banyak masalah dan kendala yang harus dicarikan solusinya. Dalam pengembangannya, wisata Siosar dapat dikatakan masih berjalan sendiri dimana terlihat dari Siosar yang masih hanya mengandalkan dan menggunakan Bumdes dalam pengelolaannya dan kerjasama yang dilakukan antar masyarakat dan pihak swasta. Objek wisata juga masih banyak dikelola oleh pihak swasta maupun pribadi, diluar itu juga fasilitas prasarana seperti jalan masih kurang memadai. Selain itu, kawasan relokasi Siosar juga dikatakan masih belum ideal menjadi desa yang mengakibatkan pembangunan desa kurang berjalan maksimal. Permasalahan yang terjadi dalam wisata Siosar ini tentu harus dicari solusi yang tepat dan perlu andil dari beberapa pihak yang terkait untuk menyelesaikannya.

Munculnya berbagai masalah atau keluhan yang didapatkan oleh masyarakat terhadap pariwisata khususnya di daerahnya sendiri telah memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan pengembangan daerah pariwisata seperti minimnya minatnya masyarakat untuk berkontribusi bagi pariwisata sehingga pengembangan pariwisata juga terkendala. Dalam menjaga kualitas dan esensi suatu daerah pariwisata dan menghindari hal yang negatif maka dibutuhkan tanggung jawab dan kerja sama yang baik antar instansi pada pengembangan pariwisata agar tidak ditinggalkannya daerah oleh wisatawan. Maka, dalam konteks ini pendekatan *collaborative governance* merupakan suatu hal yang penting untuk diaplikasikan dalam pengembangan pariwisata alam Siosar.

Collaborative governance adalah sebuah model pengendalian dimana salah satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholders non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, beorientasi *consensus*, *deliberative* dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau asset publik (Ansell & Gash, 2016). *Collaborative governance* juga dinilai sebagai proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama antar organisasi hanya terlihat tujuan telah disepakati secara bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak (Cordery, Hartman et al dalam Mah & Hills (2012:89)). Proses kolaborasi adalah suatu proses di mana didalamnya ada dialog yang membutuhkan partisipasi para pemangku kepentingan, yang akhirnya akan menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama (Ansell & Gash, 2016)

Collaborative governance sendiri dibutuhkan dalam pariwisata dikarenakan dalam membangun pariwisata, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi tetap membutuhkan bagian-bagian lainnya dalam melakukannya. Kolaborasi juga berkaitan dengan hubungan kerjasama yang jelas, dengan kepercayaan yang diimbangi dengan komitmen, struktur dan kapasitas kelembagaan. Dalam hal ini, *collaborative governance* diimplementasikan agar *stakeholders* terkait mampu bekerjasama dan mengambil peran serta mampu menerapkannya guna mengembangkan pariwisata alam Siosar, Kabupaten Karo. Selain itu, adanya *collaborative governance* diharapkan mampu membuat pariwisata lebih baik dan menyatu sehingga semua *stakeholders* dan masyarakat lokal dapat menikmati hasil yang diperoleh dari pengelolaan pariwisata Siosar.

Gray (1989 (Imron & Anwar, 2019;5) mengatakan *collaborative* akan memberikan hasil yang positif, capaian solusi untuk kepentingan seluruh *stakeholders* dilakukan dengan cara yang adil, setiap *stakeholders* mempunyai kapasitas untuk dapat berpartisipasi secara detail dalam pengelolaannya. Febrian mengatakan *collaborative governance* berbasis pada tujuan untuk dapat memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak terkait, dan tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga masyarakat sipil (Febrian, 2016:203)

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa adanya hasil-hasil positif dari *Collaborative Governance* dalam menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut. **Fuad (2018)** meneliti *Collaborative Governance* wisata religi di Surabaya. Fuad menjelaskan bahwa konflik yang ditemukan dapat diatasi dengan proses kolaborasi yang tepat seperti diskusi, pembentukan kepercayaan, komitmen, pemahaman dan

hasil yang memuaskan yang menunjukkan bahwa setiap *stakeholders* mampu menjalankan perannya masing-masing sehingga tercapainya *collaborative governance* yang baik. Selanjutnya, penelitian oleh **Bichler dkk (2019)** di Austria menjelaskan bahwa *collaborative governance* dapat menggambarkan kerjasama yang formal, jelas, aktif dan tidak berbelit-belit serta berorientasi pada manajemen publik dalam mengembangkan pariwisata di Austria. Penelitian oleh **Ni Luh dkk (2020)** menemukan bahwa *collaborative governance* menciptakan *stakeholders* yang dapat menjalankan peran-perannya dalam mengembangkan pariwisata di Bali melalui brand-brand wisata yang diciptakan guna memberikan citra dan kesan yang baik, dimana melalui penciptaan brand-brand ini dapat meningkatkan kunjungan wisata dan memperkuat citranya. Terakhir, **Iin Piani (2020)** melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* terlaksana dengan baik dan berhasil pada setiap indikator didalamnya yang kemudian dijelaskan bahwa melalui dialog tatap muka yang melibatkan tiga pihak yaitu tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan, masyarakat dan pihak ketiga dari akademisi yaitu Universitas Jenderal Soedirman. Dalam membangun kepercayaan, para pemangku kepentingan saling mendukung dan berpartisipasi dalam proses koordinasi baik rapat yang dilaksanakan. Rasa saling ketergantungan antar pemangku kepentingan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan merupakan bentuk dari komitmen terhadap proses oleh semua pihak. Saling pengertian dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pedesaan telah menjadikan tiga desa Tanggeran, Klinting dan Kemawi untuk berkembang dan desa mandiri untuk memanfaatkan potensinya. Hasil sementara pembangunan perdesaan di bawah pemerintahan Banyumas tercermin dari capaian proses kolaboratif perumusan

rencana strategis termasuk kegiatan dan upaya yang akan dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. pedesaan.

Melihat beberapa pandangan yang dijabarkan di atas, disimpulkan bahwa proses *collaborative governance* berperan penting dalam pengembangan pariwisata Siosar yaitu untuk (a) membangun kerja sama; (b) membangun kepercayaan antar *stakeholders*; (c) menghasilkan kebijakan untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, ada komponen-komponen yang dibutuhkan dalam melihat pentingnya proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata alam Siosar, Kabupaten Karo. Komponen tersebut adalah (a) *Face to Face Dialogue*, untuk melihat pertemuan *stakeholders*; (b) *Trust Building*, untuk melihat rasa percaya antar *stakeholders*; (c) *Commitment to Process*, untuk melihat komitmen *stakeholders*; (d) *Share Understanding*, untuk melihat pemahaman bersama pada *stakeholders*; (e) *Intermediate Outcomes*, untuk melihat hasil dari proses kolaborasi *stakeholders*. Kelima indikator ini masuk dalam proses *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008). Selain itu, melalui adanya *collaborative governance* dinyatakan dapat menjadi pendorong dalam mengembangkan pariwisata alam Siosar.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan kepada *stakeholders* sehingga pariwisata Siosar dapat dikembangkan dan memberikan dampak positif bagi semua pihak. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian tentang “Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat didefinisikan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a) Belum terarahnya fokus pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam mengembangkan pariwisata alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara
- b) Kurang berjalannya komunikasi yang baik antar *stakeholders* dalam usaha mengembangkan pariwisata alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
- c) Belum berjalannya proses kolaborasi yang efektif dan bersinergi dalam pengembangan pariwisata alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengembangan pariwisata alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara?
- 2) Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara?
- 3) Apa faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* dalam pengembangan alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian khusus dalam pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan sendiri. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Menganalisis Pengembangan Pariwisata Alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
2. Menganalisis Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian akan memberikan manfaat antara lain:

a) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan ide pemikiran atau masukan kepada pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait dalam proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga akan menambah teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian tentang Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tentu berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Berikut ini dijelaskan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh **Fuad (2018)** bertujuan untuk mengetahui karakteristik kolaborasi yang dilakukan antar *stakeholders*, teori yang digunakan yaitu teori Ansell dan Gash dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholders* sudah mampu menjalankan perannya dan terlihat dari setiap proses kolaborasi berjalan dengan baik meliputi diskusi, pembentukan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman serta hasil. (Amsyari, 2018). Vol 6. No. 1. Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Religi Di Makam Sunan Ampel Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(1), 10-22).

Selanjutnya, **Mafaza dkk (2020)** dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya proses *collaborative governance* dalam Program Balai Ekonomi Desa. Teori *collaborative governance* Ansell dan Gash merupakan teori yang digunakan dan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metodenya. Instrumen penelitiannya adalah *collaborative governance* diantara para *stakeholders* yang berjalan dengan baik dimana *stakeholders* telah melaksanakan tugas utama mereka secara optimal dengan menggunakan 8 indikator De Seve. Namun secara administratif, belum menjelaskan terkait keterlibatan PT. Manajemen CBT Nusantara (PT. MCN) sebagai pengelola program Balkondes,

sehingga *boundary* dan *exclusivity* dalam tata kelola belum melibatkan semua pemangku kepentingan. (Mafaza & Setyowati, 2020) *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 1-58)

Penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh **Rozikin dkk (2019)**, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *collaborative governance* dengan menggunakan *indigenous tourism* dalam mengembangkan potensi wisata, teori yang digunakan yaitu *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash melalui metode *literature review*. Hasil yang didapatkan pada penelitian berikut yaitu melalui adanya *collaborative governance* menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pariwisata didukung oleh pengembangan destinasi pariwisata, produk, infrastruktur, aksesibilitas, atraksi dan promosi.(Rozikin et al., 2019), Model *Collaborative Governance* dalam Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism. *Open Journal Systems*, 14(4), 2357-2366)

Kemudian, penelitian **Kirana & Rike (2020)** yang bertujuan menganalisis pengembangan desa wisata berbasis *collaborative governance* di Kota Batu, metode yang digunakan yaitu eksploratif menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* berjalan dengan baik dengan melibatkan sektor swasta, akademisi, media dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan, selain itu adanya komunikasi yang efektif akan memudahkan *stakeholders* dalam kolaborasi. (Kirana & Artisa, 2020), Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Collaborative Governance* di Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 6(1)).

Bichler & Magdalena (2019) melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis proses yang mendukung kolaborasi antar *stakeholders*. Teori yang

digunakan yaitu teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash dengan metode studi kasus kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, aktif, eksplisit dan berorientasi kolektif. (Bichler & Lösch, 2019) *Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into a Community-Oriented Destination. Journal Sustainability* 11(6673), 1-19)

Dalam penelitian **Piani, Iin** (2020) yang bertujuan untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog langsung melibatkan tiga pihak yaitu kelompok koordinasi pembangunan desa dan masyarakat dan pihak ketiga dari akademisi yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Membangun kepercayaan dengan saling mendukung dan berpartisipasi dalam proses koordinasi. Komitmen terhadap proses memanifestasikan dirinya dalam saling ketergantungan pemangku kepentingan dan dalam kerjasama untuk mencapai tujuan. Saling pengertian dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pedesaan telah memungkinkan tiga desa Tanggeran, Klinting dan Kemawi untuk berkembang dan desa mandiri untuk memanfaatkan potensinya. Hasil sementara pembangunan perdesaan di bawah pemerintahan Banyumas tercermin dari capaian proses kolaboratif perumusan rencana strategis termasuk kegiatan dan upaya yang akan dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah pedesaan.(Piani, 2021), *Proses Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Public Policy And Managament Inquiry*. 4(2)

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan **Yashinta (2020)** yang bertujuan mengetahui *collaborative governance* antara lembaga dan masyarakat dalam membangun pariwisata di Kebun Raya Gianyar serta menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi. Teori yang digunakan adalah teori proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil menunjukkan pengelolaan Kebun Raya Gianyar masih hanya mengandalkan pemerintah saja, kontribusi dari pihak swasta masih minimal, selain itu belum adanya aturan yang jelas dari pihak desa sehingga masyarakat belum mempunyai peran yang jelas dalam pengelolaan Kebun Raya Tematik Gianyar.(Yasinth, 2020), *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1-23).

Penelitian yang dilakukan oleh **Silayar dkk (2020)** yang bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Sula dengan teori Edward De Seve, metode penelitian yaitu kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil mengenai konsep *collaborative governance* yang terdiri dari 8 dimensi, dimana 8 dimensi ini masih belum dapat dikatakan berjalan dengan maksimal.(Silayar et al., 2021), *Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula. Jurnal Renaissance*, 6(2), 859-874).

Peneliti lainnya, **Tongkotow dkk (2021)**, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban, dengan teori yang digunakan yaitu teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada kolaborasi yang berhasil terjalin pada pemerintah dan masyarakat, dikarenakan tidak adanya kerjasama antara pemerintah dengan PT. Newmont Minahasa Raya, serta masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam pengelolaannya. (Tongkotow et al., 2021), *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok. *Jurnal Governance*. 1(1), 1-11)

Molla, Y. dkk (2021) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengamati proses dan faktor-faktor *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kampung wisata Praiijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak. Teori *collaborative governance* Ansell dan Gash dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan pengelolaan Desa Wisata Praiijing tidak efektif dengan kondisi awal, desain kelembagaan, fasilitasi kepemimpinan, dan proses kerjasama menghasilkan model kerjasama di desa wisata Praiijing. Hal ini disebabkan adanya pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan Desa Wisata Praiijing di lapangan seperti faktor budaya, kelembagaan pengelola, anggaran, letak geografis, masyarakat, tenaga SDM, atraksi budaya, penataan, kebijakan pemerintah daerah, aksesibilitas, teknologi, daya saing objek wisata sejenis dan perubahan nilai budaya akan menjadi tantangan ke depan. (Molla et al., 2021) *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*. 6(2).

Selanjutnya, **Mathoriq dkk (2021)** dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang sama. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji peran *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata. Teori yang digunakan

yaitu *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan *stakeholders* pariwisata belum berjalan optimal, belum meratanya kualitas kolaborasi tata kelola pariwisata desa disebabkan oleh lemahnya penguatan manusia dan teknis masih lemah. (Matthoriq et al., 2021). *Collaborative Governance* dalam Tata Kelola Pariwisata Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. JIAP* 7(1))

Penelitian serupa oleh **Daswati & Ismail (2020)**, yang bertujuan untuk menganalisis kolaborasi tata kelola dalam pengelolaan ICS pasca bencana di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, dan metode penelitian yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa badan kemanusiaan masih kurang berkoordinasi dengan *stakeholders* setempat, kurangnya kepercayaan antar partisipan, adanya ketimpangan koordinasi antar pemerintah dengan lembaga dan akses terhadap kelembagaan sudah ada alur yang jelas. (Daswati et al., 2020), *Collaborative Governance in the Management of Integrated Community Shelters Post Disaster (ICS) in the City of Palu. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. 5(2). 229-242).

Selanjutnya, penelitian oleh **Aeni Z & Astuti, R.S (2019)** yang bertujuan untuk mengidentifikasi sinergisitas pemerintah dan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan rencana strategis pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pati. Teori yang digunakan adalah *collaborative governance* Ansell dan Gash, metode penelitian deskriptif dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pati yakni kurangnya keaktifan pemerintah daerah dalam menggali

potensi wisata di Kabupaten Pati. Permasalahan pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati adalah belum adanya tujuan dan sasaran yang jelas dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati. (Aeni et al., n.d.) *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Kepariwisata yang Berkelanjutan *CoPAS* 1(1).

Penelitian **Islamy dkk (2017)** yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis model *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Buton dan model *collaborative governance* yang efektif dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata. Teori yang digunakan *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan *collaborative governance* di Kabupaten Buton belum berjalan maksimal karena keseimbangan peran dalam kolaborasi belum terlalu terlihat, minimnya peran swasta terkesan hanya berkolaborasi sebagai pelengkap, serta hubungan antar aktor belum berjalan dengan baik. (Islamy et al., 2017) *The Model of Collaborative Governance in Tourism Development at Buton District. International Journal of Academic Research and Reflection*, 5(2)).

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh **Fadlurrahman, dkk (2022)** Penelitian ini bertujuan menganalisis proses *collaborative governance* beserta hambatan yang menyertainya. Teori yang digunakan adalah teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa Desa Ngargogondo memiliki struktur jaringan *stakeholder* yang kurang terkoordinasi, yaitu Disparpora Kabupaten Magelang, Universitas Tidar, PT. Pegadaian, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan masyarakat itu sendiri. Walaupun masing-masing aktor telah memenuhi perannya, namun struktur jaringan yang ada saat ini masih sbelum

memiliki kesatuan visi dan cita-cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata. (Fadlurrahman et al., 2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata Di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*. 7(2).

Berikut rangkuman penelitian terdahulu dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori dan Metode	Instrumen dan Hasil Penelitian
1	Fuad Amsyari. 2018. Vol 6. No. 1. Kolaborasi Antar <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Religi Di Makam Sunan Ampel Kota Surabaya. <i>Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik</i>	Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui karakteristik kolaborasi yang dilakukan antara <i>stakeholder</i> yaitu (pemerintah, yayasan pengelola dan masyarakat)	Teori yang digunakan yaitu teori proses <i>collaborative governance</i> dari Chrish Ansell dan Alison Gash. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian memberikan hasil dari setiap proses kolaborasi, baik dari diskusi, pembentukan kepercayaan, komitmen, pemahaman beserta hasil sudah berjalan dengan baik ini karena masing-masing <i>stakeholder</i> telah mampu menjalankan perannya.
2	Mafaza. A & Setyawati. K. 2020. Vol.11, No.1 <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata. <i>Jurnal Kebijakan Publik</i> .	Penelitian ini memiliki tujuan mengidentifikasi proses <i>collaborative governance</i> dalam Program Balai Ekonomi Desa di Desa Borobudur Kabupaten Magelang.	Teori yang digunakan teori <i>Collaborative Governance</i> menurut Edward Deseve. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Instrumen dalam penelitian ini menunjukkan bahwa para <i>stakeholders</i> sudah menjalankan tugas pokok dari 8 indikator kolaborasi dan sudah berjalan dengan baik. Namun, pihak PT. Manajemen CBT Nusantara (PT. MCN) selaku pengelola program Balkondes belum menjelaskan keterlibatan mereka yang menyebabkan <i>boundary</i> dan <i>exclusivity</i> belum menyebutkan semua pihak.
3	Rozikin. Rendra Eko & Andhyka. 2019. Vol.14, No.4. Model <i>Collaborative</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis <i>collaborative</i>	Teori penelitian adalah <i>collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash dan teori <i>Indigenous tourism</i> .	Instrumen penelitian menghasilkan bahwa <i>indigenous tourism</i> dan <i>collaborative governance</i> membawa peningkatan kualitas pariwisata yang didukung dengan adanya

	<i>Governance Dalam Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism. Open Journal Systems</i>	<i>governance</i> dengan menggunakan <i>indigenous tourism</i> dalam mengembangkan potensi wisata.	Metode penelitian menggunakan <i>literature review</i> .	pengembangan destinasi, produk, infrastruktur, aksesibilitas, daya tarik dan terakhir promo pariwisata.
4	Kirana & Rike Anggun. 2020. Vol.6, No.1. Pengembangan Desa Wisata Berbasis <i>Collaborative Governance</i> di Kota Batu. <i>Jurnal Administrasi Publik (JAP)</i> .	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembangan desa wisata berbasis <i>collaborative governance</i> di Kota Batu.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.	Instrumen penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batu sudah melibatkan sektor swasta, akademisi, media dan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan dalam mengembangkan desa wisata. Tetapi dalam pelaksanaannya para aktor harus membangun komunikasi yang lebih sehingga akan memudahkan aktor dalam mengoptimalkan perannya untuk pengembangan desa wisata.
5	Bichler & Magdalena Losch. 2019. (11) <i>Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into a Community-Oriented Destination. Journal Sustainability</i> .	Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan proses yang mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pariwisata.	Teori yang digunakan <i>collaborative governance</i> menurut Ansel dan Gash. Metode penelitian studi kasus kualitatif.	Penelitian ini memberikan hasil bahwa peneliti berusaha untuk dapat menggambarkan kerjasama yang formal, efektif, eksplisit dan berorientasi dalam manajemen dan kebijakan publik untuk mengembangkan pariwisata melalui kolaborasi yang dilakukan.
6	Yashinta, Putu Naomi. 2020. Vol. 4, No.1. <i>Collaborative Governance Dalam</i>	Tujuan penelitian ini adalah mengetahui <i>collaborative governance</i> antar	Teori yang digunakan teori proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash.	Instrumen penelitian untuk melihat keterlibatan dari masing-masing <i>stakeholder</i> dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar. Hasilnya menunjukkan bahwa

	Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. <i>Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial</i> .	lembaga dan masyarakat dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di kebun raya Gianyar serta menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	pengelolaan pada Kebun Raya Tematik Gianyar masih melibatkan pemerintah saja, sedangkan kontribusi dari pihak swasta masih sedikit. Selain itu, pihak desa juga belum memberikan aturan yang jelas dalam pengembangan pariwisata sehingga peran masyarakat belum jelas dalam pengelolaan Kebun Raya Tematik Ginyar.
7	Silayar. Sartika & Mulyati. 2021. Vol.6, No.2. Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula. <i>Jurnal Renaissance</i> .	Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Sula.	Teori yang digunakan yaitu teori Edward DeSeve tentang faktor keberhasilan dalam <i>collaborative governance</i> . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Instrumen dalam penelitian ini yaitu 8 dimensi dalam <i>collaborative governance</i> yang menunjukkan bahwa struktur jaringan tidak berbentuk hierarki, masih kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah, adanya kepercayaan dari masing-masing stakeholders, belum tergambar secara jelas siapa yang bukan <i>stakeholders</i> , masih sulitnya komunikasi yang terbentuk antar <i>stakeholders</i> , laporan pertanggung jawaban setiap <i>stakeholders</i> berbeda-beda, membagi informasi yang banyak dan sumber daya manusia dan teknis yang lemah.
8	Tongkotow. Waworundeng & Kimbal. 2021. Vol.1, No.1. <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Wisata	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Wisata	Penelitian ini menggunakan 2 teori utama yaitu <i>collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash dan teori SWOT.	Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal ini karena pemerintah setempat dengan PT. Newmont Minahasa Raya tidak melakukan kerjasama yang menyebabkan masyarakat

	Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok. <i>Jurnal Governance.</i>	Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok.	Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	menjadi tidak aktif dalam mengelola wisata tersebut.
9	Molla, Y. Supriatna, Y & Kurniawati, L. 2021. Vol, VI, No.2. <i>Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (Jipsk)</i>	Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengamati proses dan faktor-faktor <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan kampung wisata Praiijng di desa Tebara kecamatan kota Waikabubak	Teori yang digunakan adalah teori <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell and Gash (2007) sebagai kajian analisis dalam penelitian ini. Metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan.	Instrumen penelitian ini terdiri dari 4 dimensi yaitu kondisi awal, design kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi yang menghasilkan model kolaborasi di kampung wisata Praiijng yang nyatanya belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan kampung wisata Praiijng di lapangan seperti faktor Budaya, Lembaga pengelola, anggaran, letak geografis, masyarakat, Sumber daya manusia, atraksi budaya, penataan, kebijakan pemerintah daerah, aksesibilitas daerah, teknologi, daya saing obyek wisata sejenis dan pergeseran nilai budaya yang akan menjadi tantangan kedepan.
10	Mathoriq. Zauhar. & Hermawan. 2021. Vol.7, No.1 <i>Collaborative Governance</i> dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa “Bumi Agrotourism” di Kota Wisata Batu).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peran <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan desa wisata khususnya di kawasan wisata	Penelitian ini menggunakan teori model <i>collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash, serta teori tambahan <i>networking</i> dan pariwisata desa.	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu keterlibatan <i>stakeholders</i> pariwisata di Kota Wisata Batu belum berjalan optimal. Kualitas pada kolaborasi tata kelola pariwisata desa di Bumiaji belum merata secara keseluruhan disebabkan oleh lemahnya penguatan bangunan kepercayaan antar para pihak <i>stakeholders</i> pariwisata untuk bersedia

	<i>Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)</i>	“bumiaji agrowisata” di wisata Kota Batu.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	melakukan tata kelola pariwisata yang kolaboratif.
11	Daswati, Muhammad, & Ismail. 2020. 5 (2). <i>Collaborative Governance in the Management of Integrated Community Shelters Post Disaster (ICS) in the City of Palu. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. 229-242</i>	Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi tata kelola dalam pengelolaan ICS pasca bencana di Kota Palu.	Teori yang digunakan adalah teori <i>collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan prioritas dan isu strategis tata kelola kolaboratif.	Hasil dalam penelitian ini memberikan 4 kesimpulan. Hasil pertama yaitu Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh badan kemanusiaan dengan <i>stakeholder</i> lainnya. Kedua, antara <i>stakeholder</i> adanya kurang kepercayaan. Ketiga, Antar pemerintah dengan lembaga masih memiliki ketimpangan dalam berkoordinasi. Keempat, Alur yang jelas dalam mengakses kelembagaan.
12	Islamy. Alwi. Haning & Allorante. 2017. Vol 5, No. 2. <i>The Model of Collaborative Governance in Tourism Development At Buton District. International Journal of Academic Research and Reflection.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi model <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan pariwisata di Kab. Buton dan mencari model <i>Governance Collaborative</i> yang efektif dapat diterapkan di Kab Buton dalam pengembangan pariwisata.	Teori yang digunakan teori <i>collaborative governance</i> menurut Ansel dan Gash. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.	<i>Collaborative Governance</i> di Kabupaten Buton ditentukan oleh peran para aktornya. Para aktor tersebut adalah pemerintah/ lembaga adat dan swasta. Keseimbangan peran dalam kolaborasi belum terlihat satu dengan lainnya, pihak swasta juga masih belum berperan dengan optimal sehingga pemerintahan kolaboratif belum berjalan secara maksimal pada Kabupaten Buton. Selain itu, hubungan antar aktor juga belum terjalin dengan baik.

13	Aeni, Z & Astuti, R. S. 2019. Vol.1, No.1. <i>Collaborative Governance</i> dalam Kepariwisata yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 di Kabupaten Pati). <i>CoPAS: Conference on Public Administration Society</i>	Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi sinergisitas pemerintah dan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan rencana strategis pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pati.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori <i>collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis interaktif.	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Pati masih kurang aktif berinovasi dalam menggali potensi wisata yang ada. Selain itu, dalam menempatkan sasaran dan target pada pengembangan pariwisata Kabupaten masih kurang jelas.
14	Fadlurrahman, Mukti, A. Kurniasih, Y & Winanta, R.A. 2022. Vol. 7, No.2. <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Pariwisata Di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. Jurnal Pemerintahan Dan Politik	Penelitian ini bertujuan menganalisis proses <i>collaborative governance</i> beserta hambatan yang menyertainya	Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori <i>collaborative governance</i> menurut Edward Deseve. Metode penelitian adalah metode deskriptif kualitatif.	Penelitian menunjukkan hasil bahwa Desa Ngargogondo memiliki struktur jaringan <i>stakeholder</i> yang tidak terkoordinir dengan baik, yaitu Disparpora Kabupaten Magelang, Universitas Tidar, PT. Pegadaian, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan masyarakat itu sendiri. Meskipun masing-masing <i>stakeholder</i> telah menjalankan perannya, namun <i>networked structure</i> yang ada belum memiliki kesatuan visi dan cita-cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata. Terdapat kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau terjadi gesekan lahan bisnis wisata di kalangan Pokdarwis, Balkondes, dan BUMDes karena pembagian kerja yang tidak

				jelas jika suatu saat dibentuk struktur jaringan yang terorganisir.
15	Piani, I. 2020. Vol. 4 No.2. Proses <i>Collaborative Governance</i> Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. <i>Public Policy And Managament Inquiry</i> .	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses <i>collaborative governance</i> dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Banyumas melalui proses kolaborasi pihak yang terlibat koordinasi pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga	Penelitian ini menggunakan teori proses <i>collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.	Kerjasama tata kelola berjalan dengan baik dan berhasil pada setiap indikator, yang menjelaskan bahwa dialog tatap muka dilakukan dengan partisipasi tiga pihak, termasuk kelompok koordinasi pembangunan daerah, pedesaan, masyarakat dan pihak ketiga. civitas akademika yaitu Universitas Jenderal Soedirman. Dalam membangun kepercayaan, para pemangku kepentingan saling mendukung dan berpartisipasi dalam proses koordinasi. Rasa saling ketergantungan antar pemangku kepentingan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan merupakan bentuk komitmen terhadap proses oleh semua pihak. Saling pengertian dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan perdesaan telah memungkinkan ketiga desa tersebut berkembang dan desa mandiri dapat memanfaatkan potensinya. Hasil sementara pembangunan pedesaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas tercermin dari pelaksanaan proses kolaboratif yang menghasilkan rencana strategis yang memuat kegiatan dan upaya yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut yaitu mengetahui, mengidentifikasi kemudian menganalisis pengembangan pariwisata pada daerah penelitian melalui pendekatan *collaborative governance* dan menggunakan aspek yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu teori oleh Ansell dan Gash. Tetapi tidak terfokus pada proses *collaborative governance* secara khusus. Di beberapa penelitian ada yang menggunakan teori *collaborative governance* menurut Edward Deseve dimana dalam penelitian tersebut ingin jauh lebih mengetahui tentang keberhasilan dan faktor penghambat dalam *collaborative governance*. Namun, secara keseluruhan pembahasan yang dituju adalah pengembangan sektor pariwisata.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terfokus kepada proses *collaborative governance* tersebut dengan menggunakan variabel *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitment to process* (komitmen terhadap proses), *shared understanding* (berbagi pemahaman), dan *intermediate outcomes* (hasil sementara). Maka alasan utama menggunakan teori dan variabel tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana berjalannya proses *collaborative governance* dalam pariwisata Siosar, serta belum adanya penelitian yang dilakukan untuk menganalisis tentang Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

1.7 Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan teori-teori yang dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka adalah penjelasan yang harus berisi tentang pernyataan-pernyataan peneliti sebelumnya mengenai penelitian yang sama yang dikerjakan. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian saat ini, yaitu:

1.7.1 Administrasi Publik

Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama (Marliani, 2019:18) Stephen Robbins (1983, dalam (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020:20) mengatakan administrasi merupakan keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain. Pendapat ini juga didukung Waldo yang menyatakan administrasi suatu daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Menurut Y. Wayong dalam (Suardita, 2017:4), administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi yang pemerintah agar tujuannya tercapai. Chandler dan Plano dalam (Marliani, 2018:5) mengemukakan bahwa: “Administrasi publik adalah suatu proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan publik”. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

Maka, kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

1.7.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu, dan berisikan teori pokok, konsep, asumsi, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu maupun pemecahan permasalahan praktis.

Dalam konsepnya, George Frederickson dalam (Marliani, 2018:6) merumuskan enam model paradigma administrasi publik yang diuraikan dari sudut teori, yaitu;

(1) Paradigma 1, Birokrasi Klasik, adalah struktur organisasi dan fungsi atau prinsip-prinsip manajemen dan lokusnya adalah berbagai bentuk organisasi pemerintah dan bisnis. Paradigma ini ingin mewujudkan efisiensi, efektivitas, ekonomi dan rasionalitas.

(2) Paradigma 2, Birokrasi Neo-Klasik, Paradigma ini berfokus pada proses pengambilan keputusan yang diambil birokrasi pemerintahan dengan perhatian

khusus kepada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisa sistem, dan penelitian operasi, dan lokusnya pada keputusan yang dihasilkan.

(3) Paradigma 3, Kelembagaan, paradigma ini berfokus pada pemahaman tentang perilaku birokrasi yang dipandang juga sebagai sesuatu yang kompleks, dan juga pada proses pengambilan keputusan yang incremental dan gradual.

(4) Paradigma 4, Hubungan Antar Manusia, paradigma ini berfokus pada dimensi-dimensi hubungan antar-manusia dan aspek sosial-psikologi dalam tiap bentuk organisasi dan birokrasi.

(5) Paradigma 5, Pilihan Publik, paradigma ini menyatakan bahwa administrasi publik tak lepas dari politik dan lokusnya adalah pilihan publik dalam pelayanan barang dan jasa yang diberikan oleh berbagai bentuk dan jenis organisasi.

(6) Paradigma 6, Administrasi Publik Baru, Frederickson berupaya untuk mengorganisasikan, mendesain, dan membuat organisasi dapat berjalan kearah perwujudan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal melalui pengembangan sistem desentralisasi dan pembentukan organisasi yang responsif dan partipatif, serta memberikan jasa yang diperlukan.

1.7.3 Manajemen Publik

Dalam administrasi publik, berbicara mengenai 2 konsentrasi, yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Robbins dan Coulter dalam (Satispi & Ahmad Dahlan, 2018:7) menyebutkan manajemen adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Selain itu Gibson, Donnelly dan Ivancevich menyebutkan manajemen adalah proses yang dilakukan seorang atau beberapa orang untuk mengkoordinasikan aktifitas orang lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak dapat

dicapai oleh orang itu sendiri. Dalam bukunya, Andy dan Oscar (2014) menjelaskan, manajemen publik merupakan cabang dari administrasi publik yang secara khusus membahas keilmuan mengenai desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumberdaya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia dan evaluasi program dan audit. Manajemen publik fokus pada internal organisasi sektor publik, yaitu bagaimana mengatur organisasi sektor publik bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan.

Dalam hal analisis manajemen publik, Laurence Lynn (1996 dalam (S. M. Putri, 2019:3) mempertimbangkan tiga kemungkinan tentang gambaran manajemen publik, yaitu sebagai seni (*art*), ilmu (*science*) dan profesi (*profession*). Manajemen publik dinilai sebagai aktivitas yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dan sangat tergantung dari situasi dan kondisi dimana beroperasi.

Menurut Overman dalam (Prihatin & Dwimawanti, 2021:5), mengemukakan manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing, controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informs dan politik disisi lain. Manajemen publik adalah proses menggerakkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya non manusia sesuai perintah kebijakan publik.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka disimpulkan bahwa manajemen publik adalah suatu upaya dalam mengatur, merencanakan dan melaksanakan suatu kebijakan yang dilakukan di publik dengan tujuan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

1.7.4 Teori *Collaborative Governance*

1.7.4.1 Definisi *Collaborative*

Collaborative berasal dari kata bahasa Inggris yaitu ‘*co-labour*’ yang artinya bekerja bersama. Adanya berbagai permasalahan dalam suatu organisasi yang menjadikan titik awal *collaborative* sering digunakan dalam organisasi. *Collaborative* merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. *Collaborative* membutuhkan berbagai macam aktor baik individu maupun organisasi yang bahu membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama.

Thompson & Perry (1992) menyatakan bahwa *collaborative* adalah proses di mana para aktor otonom atau semi otonom berinteraksi melalui negosiasi formal atau informal, secara bersama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara-cara untuk bertindak atau memutuskan masalah yang membuat mereka bersama-sama (Manurung & Mashur, 2021:24). Sejalan dengan itu, O’Leary dan Bingham dalam (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020:42) mengatakan kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian.

Grey dalam (A. R. Putri, 2021) juga menyatakan bahwa *collaborative* adalah sebuah proses ada kesadaran diri dari berbagi pihak yang memiliki keterbatasan dalam melihat suatu permasalahan untuk kemudian mencoba mengeksplorasi perbedaan untuk mencari solusi. Dalam mencapai tujuan tersebut maka yang melatarbelakangi organisasi melakukan kerjasama dengan organisasi

lainnya. Haryono dalam (Irawan, 2017:1) mengartikan kolaborasi sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.

Fendt (2010) dalam (Prihatin & Dwimawanti, 2021:6) menyebutkan ada tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu:

1. Perlunya kolaborasi dalam suatu organisasi karena untuk menyelesaikan tugas tertentu tidak bisa dengan seorang diri tanpa bantuan pihak lain.
2. Keuntungan yang diperoleh juga akan lebih besar dibandingkan dengan bekerja sendiri.
3. Melalui kolaborasi organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing.

1.7.4.2 Definisi *Collaborative Governance*

Collaborative governance pada awalnya berasal dari konsep *governance*, yang mengandung makna bahwa keterlibatan penuh unsur-unsur pemerintah maupun non pemerintah (Dwiyanto, 2018:4) . Konsep *governance* mengandung makna pemerintah bukan menjadi *the only actor* dalam *decission making*. Dimana saat ini pemerintah harus mulai mengikutsertakan swasta dan masyarakat dalam menyelesaikan yang terjadi di publik. Namun, harus sesuai dengan prinsip dimana masing-masing *stakeholders* memiliki tugas dan keterkaitan yang jelas dan tidak bertumpu pada kekuatan otonom daerah (Alputra Sudirman, 2022)

Dalam Adji (2017: 157), Emerson at all (2012) mengatakan bahwa *collaborative governance* yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta merupakan salah satu cara guna untuk mencari solusi bersama atas

permasalahan bersama. Tetapi dalam mencapai tujuannya, tata kelola kolektif harus didasarkan pada *grand design* atau *master plan*. Menurut Mc Guire (2006) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* adalah konsep di dalam manajemen pemerintahan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat, maupun NGOs yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi pemerintah saja. (Purnomo et al., 2018)

Ansell and Gash mengatakan model *collaborative governance* yaitu suatu kondisi awal dalam suatu kolaborasi yang dipengaruhi oleh beberapa fenomena, dimana para *stakeholders* memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing *stakeholders*, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya dan pengetahuan. Ansell dan Gash (2007:546) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut ini:

“*Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat *formal*, berorientasi *consensus* dan *deliberative* yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.” (Ansell & Gash, 2016)

Edward Deseve mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas. Balogh (et.al) juga menyatakan *collaborative governance* sebagai sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau

instansi publik, swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak. (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020:42)

Selanjutnya, Donahue dan Richard dalam (Irawan, 2017:6) juga mengartikan bahwa *collaborative governance* sebagai suatu bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana. Pendapat ini juga didukung dengan pernyataan Kirk Emerson et.al dalam Hariadi (2019:18) yang menyatakan *collaborative governance* sebagai suatu proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika dilakukan satu pihak saja.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan *collaborative governance* adalah suatu kerjasama yang terlaksana antara instansi dan lembaga dalam membuat kebijakan atau menciptakan program guna kepentingan publik dengan tujuan meningkatkan kualitas dari publik itu sendiri.

1.7.4.3 Tujuan *Collaborative Governance*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *collaborative* menjadi salah satu hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Junaidi (2015, dalam (Cahya, 2020:10) menyebutkan bahwa *collaborative governance* muncul bukan tanpa adanya suatu alasan, *collaborative* muncul disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong agar terlaksananya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Ansell dan Gash dalam (Mutiarawati, T., 2017;5) mengatakan bahwa *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini dilakukan sebagai berikut ini:

(1) kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, (2) konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, dan (3) upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik. (4) Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan. (5) Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan. (6) Mobilisasi kelompok kepentingan. (7) Tingginya biaya dan politisasi regulasi (Junaedi, 2015:10).

Ansell dan Gash dalam (Cahya, 2020;11) menyebutkan *collaborative governance* muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi. Kolaborasi juga muncul dilatarbelakangi karena adanya aspek kebutuhan kerjasama, keterbatasan kemampuan program dan dana anggaran sehingga adanya kolaborasi. *Collaborative* juga bertujuan untuk dapat memobilisasi kepentingan-kepentingan dan menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi kegiatan atau program dari keterbatasan yang ada.

1.7.4.4 Model-Model *Collaborative Governance*

Dalam bukunya Islamy (Islamy, 2018:11), menyatakan model sangat dekat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu selalu menggunakan model untuk menyederhanakan tantangan hidupnya. Model juga merupakan cara alamiah untuk memperoleh gambaran dunia nyata dengan mempelajari replika yang

mencerminkan fenomena. Adanya interpedensi antaraktor maupun antarorganisasi membuat kolaborasi menjadi sangat dibutuhkan. Semakin besar interdependensi antaraktor atau antarorganisasi baik secara vertikal maupun horizontal maka semakin besar pula kebutuhan untuk berkolaborasi.

Berdasarkan paparan di atas, maka Islamy (Islamy, 2018:12) menjelaskan sejumlah model *collaborative governance* yang dikemukakan para ahli, diantaranya:

1. Model Agranoff dan Mc. Guire

Model Agranoff dan Mc Guire melihat kolaborasi dari dua variabel yaitu aktivitas dan strategi, dari dua variabel ini dikembangkan lagi sehingga menghasilkan gaya kolaborasi yaitu, *jurisdiction based, abstinence, top down, donor recipient, reactive dan contented*.

2. Model Butler – Coleman

Model ini menjelaskan model kolaborasi berdasarkan variabel level interaksi dan variabel ukuran kelompok, dari kedua dimensi tersebut menghasilkan lima gaya yaitu; *library, solicitation, tim, community dan process support*.

3. Model Weber *et al.*

Weber *et al.* mengemukakan kolaborasi yang menekankan integrasi pada fungsi, yang meliputi fungsi birokrasi, lintas arena kebijakan dan level pemerintahan dan warga ikut terlibat. Ada tiga dimensi yang diungkapkan oleh Weber yaitu dimensi vertikal, dimensi horizontal, dan dimensi *partnership linkage*.

4. Model Ansell dan Gash

Model ini memiliki empat variabel yang dijadikan perhatian yaitu: Kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Masing-masing variabel ini kemudian dapat diperkecil lagi menjadi sub-sub variabel. Variabel proses kolaborasi merupakan inti dari model ini, sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan dipresentasikan sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi. Variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

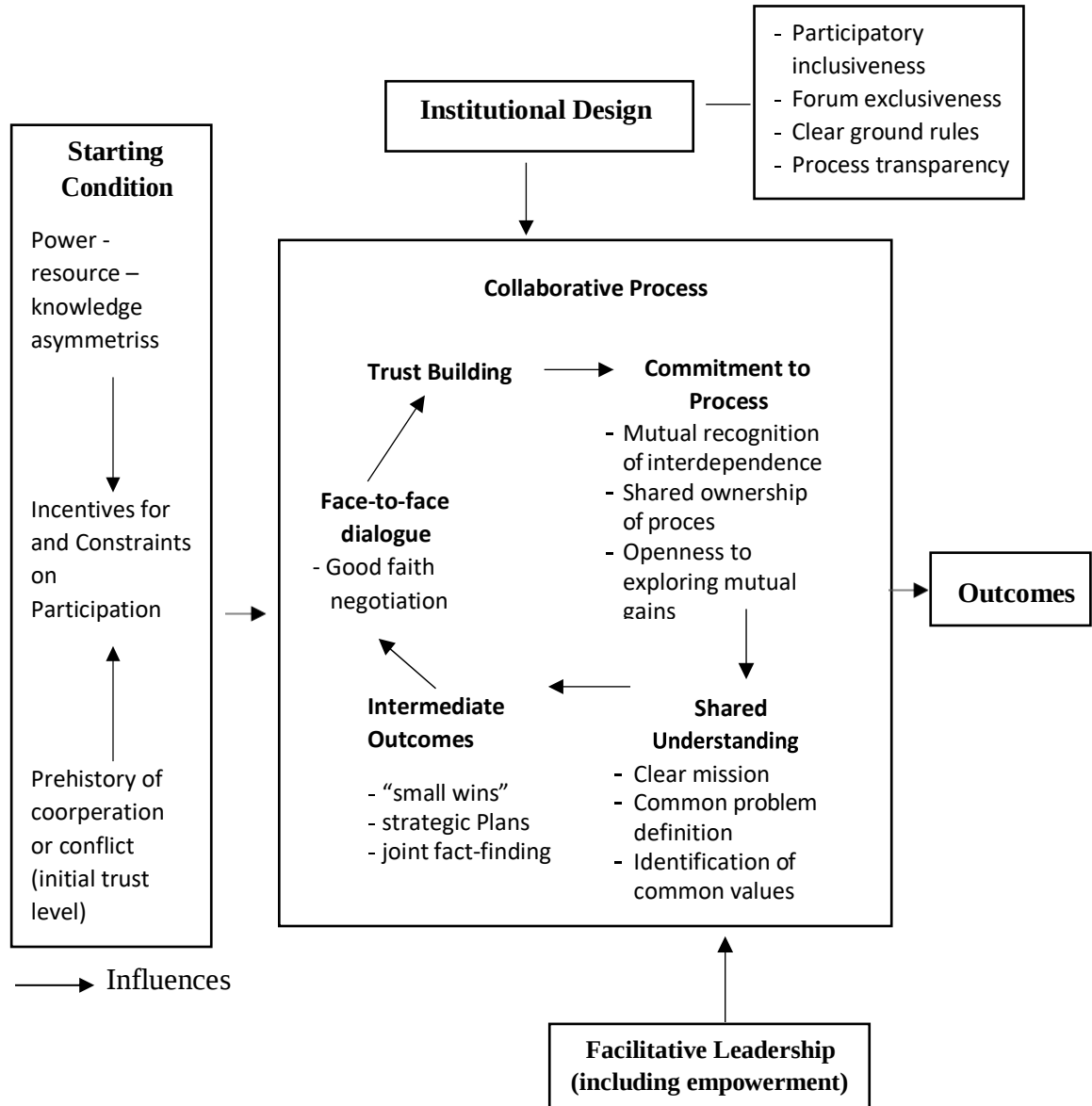
- a. **Kondisi Awal**, banyaknya kolaborasi yang gagal dikarenakan perbedaan pandangan tersebut berdasarkan pengalaman pahit yang pernah di alami oleh *stakeholder* dimana munculnya isu lokal *emotional* yang mempengaruhi kepercayaan dan saling mencurigai satu sama lain, sehingga muncul anggapan saling bermusuhan.
- b. **Desain Kelembagaan**, dengan memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan-aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan.
- c. **Kepemimpinan Fasilitatif**, kepemimpinan fasilitatif secara luas dilihat sebagai unsur penting dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan dan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin dapat timbul dalam proses kolaborasi.

d. **Proses Kolaborasi**, proses kolaborasi dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- Bagaimana membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi
- Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi.
- Berbagi pemahaman tentang misi dan permasalahan yang dihadapi serta mengidentifikasi nilai umum-umum dalam kolaborasi.
- *Intermediate Outcomes*, dengan melihat bagaimana meraih kesuksesan awal, melakukan perencanaan strategik, dan penemuan fakta secara bersama.
- *Face to face dialogue* dalam hal ini melakukan negosiasi dengan itikad yang baik.

Model Ansell dan Gash ini akan di lebih dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 1.11 Model *Collaborative Governance*



Sumber: (Ansell & Gash, 2016:550)

Berdasarkan beberapa model *collaborative governance* dari beberapa ahli diatas, maka penulis memilih untuk menggunakan *model collaborative governance* menurut **Ansell dan Gash**. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan salah satu tahapan dari model *collaborative governance* Ansell dan Gash, yaitu proses

kolaborasi yang terdiri dari; *face to face dialogue*, *trust building*, *commitmen to process*, *share understanding*, dan *intermediate outcomes*.

1.7.4.5 Proses *Collaborative Governance*

Ansel dan Gash menyebutkan bahwa proses kolaborasi lebih dijelaskan sebagai sebuah siklus dibandingkan sebuah proses yang bertahap, dimana sebagai sebuah siklus sub komponen dalam proses kolaborasi saling mempengaruhi satu sama lain (Astari et al., 2019;3). Islamy mengatakan *collaborative governance* senantiasa digambarkan sebagai tahap pengembangan kesepakatan yang menjelaskan bagaimana fase-fase program kolaborasi yang dilaksanakan mulai dari fase pra negoisasi, fase negosisasi sampai pada implementasi program, sehingga keberhasilan kolaborasi tergantung bagaimana siklus kolaborasi berputar (Islamy, 2018:51)

Proses kolaborasi terdiri dari beberapa komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, dalam diantaranya:

a. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Kolaborasi didasarkan pada dialog tatap muka atau dialog langsung yang diperlukan oleh para *stakeholder* yang terlibat untuk saling mengenal satu dengan lainnya. Dialog tatap muka penting untuk dilakukan antar kolaborasi yang terlibat sehingga para *stakeholder* yang terlibat dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan perannya masing-masing. Dikatakan bahwa dialog tatap muka juga merupakan salah satu upaya dalam membangun kepercayaan dalam menjalankan kolaborasi.

b. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Dalam menjalankan proses kolaborasi, membangun kepercayaan merupakan sesuatu yang perlu untuk segera dilakukan oleh pemangku kepentingan. Sehingga dalam kolaborasi tidak hanya negosiasi saja yang terlaksana, namun adanya kepercayaan satu dengan yang lainnya agar tidak adanya egosentrisme yang muncul. Membangun kepercayaan merupakan bentuk dari proses saling memahami antar pihak yang memiliki kepentingan agar terbentuk komitmen untuk menjalankan kolaborasi.

c. *Commitment to Process* (komitmen terhadap proses)

Komitmen yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang terlibat merupakan variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan dalam penerapan kolaborasi. Komitmen ada guna mencegah resiko yang timbul dari proses kolaborasi, juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam memandang relasi yang dilakukan sebagai hal baru dan tanggung jawab yang dikembangkan. Komitmen pada proses yang terjalin menjelaskan seberapa jelas, adil dan transparan suatu prosedur.

d. *Share Understanding* (Pemahaman bersama)

Dalam proses kolaboratif, *stakeholder* harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama kolektif. Dimaksud dengan pemahaman bersama yaitu misi bersama, kesamaan niat, tujuan yang sama, visi bersama, ideologi bersama, tujuan yang jelas atau keselarasan inti.

e. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Tahapan ini merupakan hasil dari proses kolaborasi yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* muncul apabila tujuan yang mungkin dan akan memberikan keuntungan dari kolaborasi.

Proses kolaboratif merupakan suatu proses dimana didalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama.

1.7.4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance*

Dalam menjalankan *collaborative governance* tentu ada faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung keberhasilannya suatu kolaborasi, namun tentu juga memiliki faktor yang dapat menghambat. Menurut De Seve (2007, dalam buku berjudul “*Creating Public Value Using Managed Networks*”), ada delapan (8) elemen yang diperhatikan dalam melihat faktor pendukung dan penghambat dalam suatu proses kolaborasi (Deseve, 2007), delapan elemen diantaranya yaitu:

1. *Networked Structure* (struktur jaringan), suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Dimana unsur jaringan tersebut tidak boleh membentuk hierarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak sehingga tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Jadi, semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan), komitmen dibutuhkan dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara bersama-sama. Komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu *stakeholders* atau pemangku kepentingan kebijakan sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerintah kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.
3. *Trust Among The Participants* (Kepercayaan) merupakan sikap saling percaya antar pemangku kepentingan dibutuhkan untuk membawa hubungan yang terjalin menjadi profesional dalam mencapai tujuan bersama. Adanya saling percaya diantara para pelaku kolaborasi didasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.
4. *Governance* merupakan sebuah proses interaksi maupun hubungan timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negaranya dalam membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi permasalahan publik. Adanya kepastian atau kejelasan dalam tata kelola merupakan salah satu unsur bagi berhasilnya sebuah jaringan (network) atau kolaborasi.
5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan), tersedianya standar-standar (ukuran-ukuran) ketentuan prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Bagi kebanyakan *stakeholder*, mereka harus memberi kesan kepada *stakeholders* lainnya untuk memberikan otoritas guna mengimplementasikan keputusan-keputusan atau menjalankan

pekerjaannya. Akses terhadap kekuasaan ini akan mempengaruhi jalannya kolaborasi yang dibangun antar para *stakeholders*.

6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas), berbagi pemerintahan termasuk penataan, pengelolaan dan manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya dan berbagi sejumlah keputusan kepada seluruh anggota; dan dengan demikian bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan.
7. *Information Sharing* (Berbagi Informasi), difokuskan pada kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.
8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya) merupakan ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaborasi. Suatu organisasi tentu bergantung pada sumber daya untuk mewakili mereka dalam proses pemerintahan kolaboratif dan menggunakan sumber daya untuk mempengaruhi pelaku kolaborasi lain dalam proses kolaboratif yang akan atau sedang berjalan.

1.7.5 Pariwisata

1.7.5.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu kegiatan atau aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lainnya yang

bersifat sementara bukan untuk bekerja melainkan melakukan sesuatu yang diinginkan. Secara etimologi, pariwisata berasal dari 2 bahasa sansekerta, yaitu *Pari* berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan *wisata* berarti “pergi” atau “bepergian”. Gunn dalam (Purba, 2018:13) menyebutkan pariwisata dinilai sebagai suatu sistem dan kemudian memilahnya dalam sisi permintaan dan penawaran. Komponen permintaan atas elemen orang, serta keinginan untuk melakukannya sedangkan komponen penawaran adalah daya tarik wisata, transportasi, informasi dan promosi, dan pelayanan.

Jafari, El Rouby, & Wahab (1992 dalam (Fauziah Eddyono, 2021:228), menyatakan pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Mill dan Morison (Suwena & Widyatmaja, 2017:28) mengatakan bahwa pariwisata terkait erat dengan aktivitas perpindahan tempat yang merupakan sebuah sistem dimana bagian-bagian yang ada tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dengan satu sama lain seperti jaring laba-laba. Maka, pariwisata juga disebutkan sebagai sektor yang dinamis, yang dikembangkan kemudian juga ikut mengembangkan dan memberikan efek kepada ekonomi lainnya. (Fauziah Eddyono, 2021:228)

Pariwisata menurut daya tariknya menurut Fandeli (1995:3) dalam (Heryati, 2019:58) dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Daya Tarik Alam Pariwisata merupakan kegiatan wisata yang dilakukan dengan mengunjungi daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan daya

tarik alamnya, seperti laut, pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan dan objek wisata yang masih alami.

2. Daya Tarik Budaya Pariwisata merupakan suatu wisata yang dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan atau kekhasan budaya, seperti desa budaya, museum daerah, rumah adat atau tempat bersejarah lainnya di daerah tujuan wisata.

3. Daya Tarik Minat Khusus Pariwisata, merupakan pariwisata yang dilakukan dengan mengunjungi objek wisata yang sesuai dengan minat seperti wisata olahraga, wisata rohani, wisata kuliner, wisata belanja, dengan jenis-jenis kegiatannya. Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subjek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dan objek wisata yang merupakan tujuan wisatawan.

1.7.5.2 Tujuan dan Manfaat Pariwisata

Pariwisata memiliki manfaat dan tujuan dalam aktivitasnya, hal ini diatur dalam Undang-Undang (Revida et al., 2020). Menurut UU No.10 Tahun 2009 Pasal 3 Pariwisata memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, spiritual, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, tujuan dari Kepariwisata adalah untuk: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan rakyat, c) menghapus kemiskinan; d) mengatasi pengangguran; e) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, f) memajukan kebudayaan, g) mengangkat citra bangsa; h) memupuk rasa cinta tanah air; i) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j) mempererat persahabatan antarbangsa (Putri, 2019;34)

1.7.5.3 Unsur-Unsur Komponen Pariwisata

Dalam melakukan pariwisata, ada beberapa unsur-unsur penting dalam komponen pariwisata yang harus diperhatikan. Yoeti (Yoeti, 2008) menyebutkan komponen pariwisata terdiri dari 5 unsur yaitu:

a. *Attraction* (daya tarik)

Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang berada dalam kawasan wisata yang dapat menarik pengunjung untuk dapat mengunjungi wisata tersebut. Hal menarik yang disebutkan termasuk objek wisata alam, objek wisata buatan manusia, dan cara manusia hidup. Melalui objek wisata ini wisatawan dapat melihat hal-hal yang tidak ditemukan dalam keseharian.

b. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Akses dalam pariwisata merupakan hal penting dalam pariwisata yang berkaitan dengan bagaimana wisatawan mencapai objek wisata dengan nyaman dan aman. Hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam memilih objek wisata serta sarana transportasi yang dimiliki juga berpengaruh signifikan, seperti jalanan, transportasi dan komunikasi.

c. *Accommodation* (akomodasi)

Akomodasi merupakan tempat wisatawan akan menginap untuk sementara waktu di daerah wisata ketika berkunjung. Sarana akomodasi yang diharapkan tentu bersih, pelayanan yang baik, dan harga yang sesuai dengan apa yang diterima. Jenis akomodasi biasanya seperti penginapan hotel, *homestay*, perkemahan, villa dan lainnya.

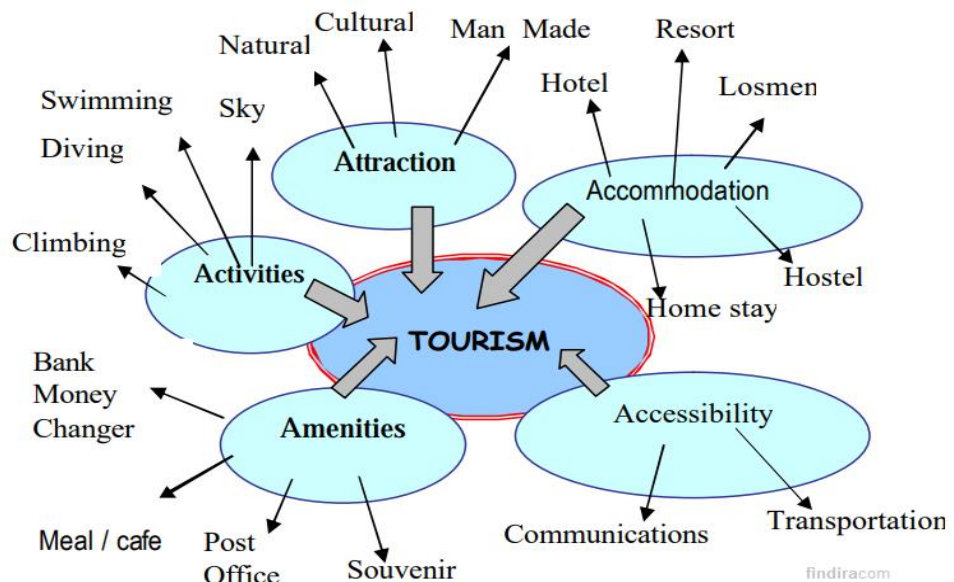
d. *Amenities* (Amenitas)

Amenitas merupakan segala bentuk fasilitas yang diberikan kepada wisatawan selama mereka sedang berwisata di tujuan wisata dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dimana wisatawan tidak hanya membutuhkan objek alam namun diikuti oleh prasarana dan sarana yang mendukung, meliputi restoran, toko souvenir, pusat kesehatan, toilet umum, keamanan dan bank.

e. *Ancillary Service* (Pelayanan Tambahan)

Pelayanan tambahan atau disebut faktor pendukung merupakan sesuatu fasilitas yang disediakan oleh daerah tujuan wisata untuk para pengunjung maupun pelaku wisata. Biasanya hal ini adalah sikap masyarakat setempat dalam memberikan informasi kepada wisatawan. Bagaimana masyarakat setempat juga menentukan bagi wisatawan untuk berkunjung.

Gambar 1.12: Skema 5A dalam Pariwisata



Sumber: (Findira.com, 2021)

1.7.5.4 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*), maka pengembangan pariwisata harus dilakukan dalam kesatuan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Sunaryo dalam (Sulastri, 2017:1) menyebutkan pembangunan pariwisata merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manusia secara terencana terhadap kepariwisataan yang dinilai kurang baik menuju kondisi kepariwisataan yang lebih baik. Swabroke (1996:99) menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata adalah rangkaian ataupun usaha untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata, mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan keberlangsungan pariwisata (Purba, 2018). Selain itu pengembangan pariwisata secara langsung juga dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat serta pendapatan devisa negara dan mengurangi angka pengangguran.

Dalam pengembangan pariwisata, Yoeti dalam (Ginting & Suryawan, 2018:3) menyebutkan bahwa: “pengembangan pariwisata memerlukan perhatian beberapa aspek yaitu, wisatawan, transportasi, atraksi/obyek wisata, fasilitas, informasi dan promosi, serta merumuskan kebijakan”. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda yang harus dipahami agar dapat mencapai dan melaksanakan pembangunan pariwisata di suatu daerah dengan baik. Joyosuharto (1995, dalam (Kamaru et al., 2017:4) menyatakan bahwa tiga fungsi dari adanya pengembangan pariwisata yaitu: 1) menggalakkan ekonomi, (2) memelihara kepribadian bangsa & kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, (3) memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Pernyataan

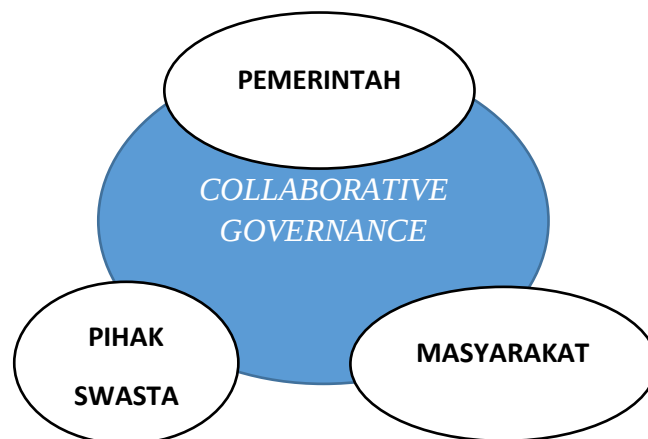
tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki berbagai potensi yang harus dikembangkan lebih lagi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, rekreasi keluarga dan akan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

1.7.6 Stakeholders

Dalam kolaborasi dibutuhkan keterlibatan *stakeholder* sesuai peran masing-masing pihak. *Stakeholders* adalah semua pihak yang ada dalam masyarakat baik secara pribadi, kelompok masyarakat atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap isu atau permasalahan di dalam organisasi atau lingkungan. *Stakeholders* dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020:135). Menurut Hetifah (2003 dalam (Amalyah et al., 2016:159) *stakeholder* dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Peran *stakeholder* dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan di bidang pariwisata. Salah satu *stakeholder* yang berperan dalam pembangunan pariwisata adalah pemerintah namun pemerintah memiliki keterbatasan.

Keterlibatan peran *stakeholders* diharapkan menghasilkan perencanaan strategi pariwisata yang dapat diterima dengan baik, menghindari konflik yang timbul selama implementasi kebijakan dan menyatukan mereka yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam pariwisata. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang berbeda yang perlu dipahami sedemikian rupa

agar pengembangan objek dan daya tarik wisata di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Ada tiga *stakeholder* pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan suatu objek wisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Rahim, 2012 dalam (Amalyah et al., 2016:159)



Gambar 1.13: 3 Pilar *Collaborative Governance* dalam Pariwisata

Berdasarkan teori-teori yang dipaparkan diatas, maka dapat dijelaskan hubungan teori administrasi publik, paradigma administrasi publik, manajemen publik dengan teori proses *collaborative governance* pada penelitian ini yaitu administrasi publik adalah suatu kerja sama yang dilaksanakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan publik dan didukung dengan adanya manajemen publik maka bermakna bahwa dalam menyediakan layanan publik pemerintah mengatur, mengorganisasikan serta menggerakkan sumber daya manusia dan non-manusia untuk memenuhi kebutuhan publik, salah satunya melalui pariwisata. Adanya proses *collaborative governance* menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan publik yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo yang menyediakan pariwisata Siosar serta mengembangkannya. Dalam menjalankan pengembangan pariwisata tentu membutuhkan *stakeholders* atau pemangku kepentingan sehingga dibutuhkan

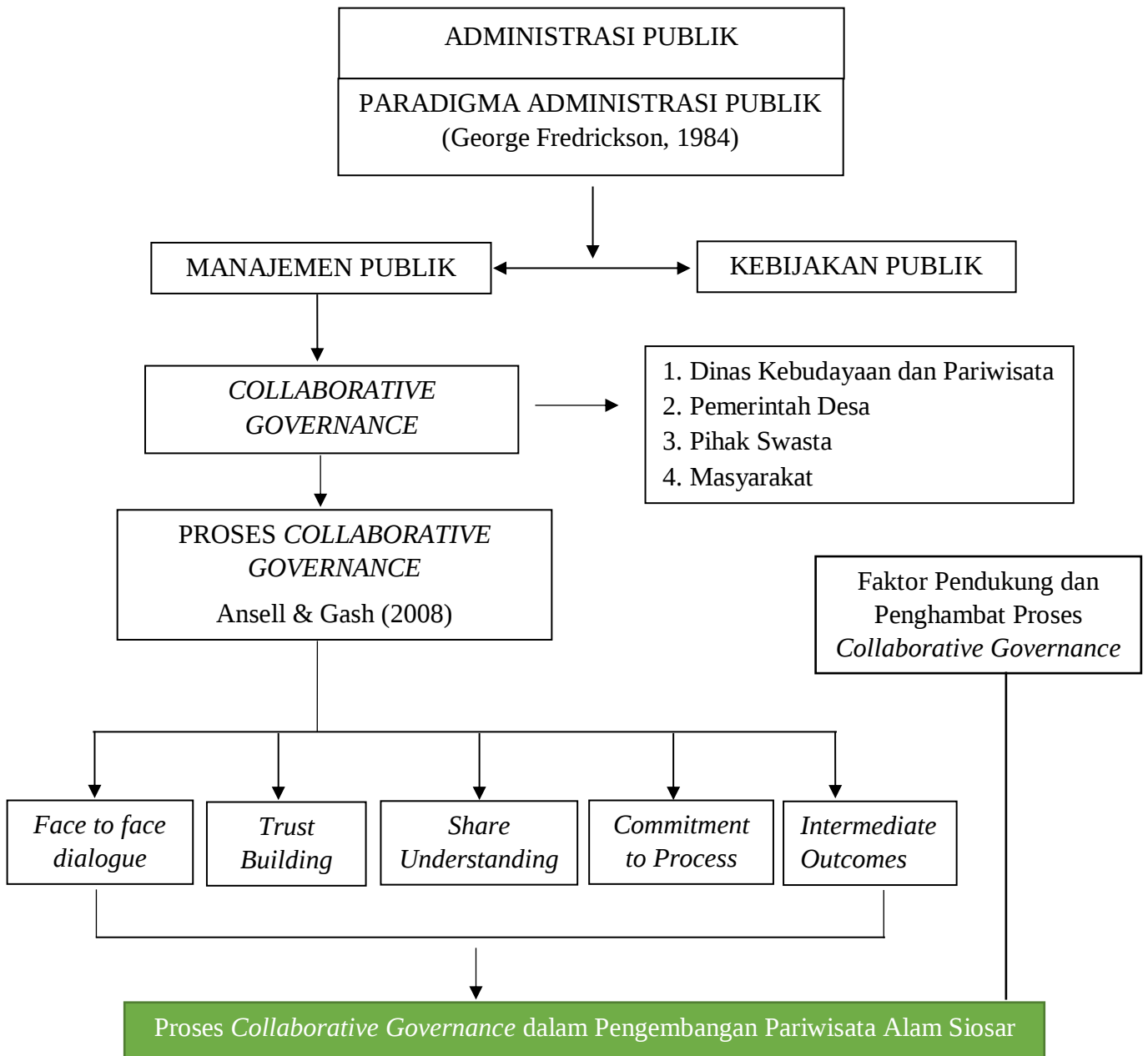
kerjasama ataupun kolaborasi dalam mengembangkan pariwisata Siosar. Maka melalui pendekatan proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh *stakeholders* sebagai tujuan pemenuhan kebutuhan publik melalui penyediaan pariwisata yang layak dan baik dapat tercapai dan terpenuhi sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Paradigma administrasi publik ada 6 yaitu birokrasi klasik, birokrasi neo-klasik, kelembagaan, hubungan antar manusia, pilihan publik, dan administrasi publik baru. Penelitian yang dilakukan termasuk kedalam paradigma administrasi publik baru, dikarenakan penelitian berhubungan dengan adanya suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi yaitu pemerintah dalam mewujudkan nilai kemanusiaan melalui adanya pengembangan pariwisata sehingga penyediaan jasa layanan publik dapat tercapai serta pemerintahan yang responsif dan partisipatif dalam menyediakan layanan publik.

1.7.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran masalah yang menjelaskan bentuk hubungan antar variabel di dalam penelitian. Tahapan ini dilakukan untuk membentuk permasalahan yang ada sehingga penelitian terfokus dengan baik dan tidak keluar dari topik permasalahan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus topik permasalahan yaitu proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Gambar 1.14

Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti, 2021

1.7.8 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Singarimbun dan Efendi menyatakan definisi konseptual adalah petunjuk bagaimana suatu variabel dapat diukur, dengan membaca definisi operasional dalam penelitian dan disesuaikan dalam lapangan. Definisi konseptual yang berhubungan pada penelitian ini yaitu;

- a. *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Alam Siosar adalah suatu hubungan kerjasama yang terbentuk antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan tujuan yang sama dimana memiliki rasa saling membutuhkan satu dengan lainnya dan masing-masing pihak sudah memahami kedudukannya dalam pengembangan pariwisata. Adapun proses kolaborasi yang dilaksanakan ialah melalui tahap dialog tatap muka atau pertemuan antar *stakeholder*, membangun kepercayaan antar *stakeholders*, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan memperoleh hasil sementara.
- b. Pengembangan Pariwisata Alam Siosar bertujuan untuk dapat mengembangkan pariwisata yang ada di Siosar untuk menjadi destinasi wisata yang lebih dikenal banyak orang dan menjadi wisata prioritas khususnya di Kabupaten Karo yang dilaksanakan oleh para *stakeholders* yang terlibat mengenai pariwisata Siosar dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Wekke Suardi, 2019) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang dimiliki lebih ditampilkan. Proses penelitian meliputi mengajukan pertanyaan dan prosedur penelitian yang bersifat sementara, mengumpulkan kumpulan data, meringkas dan menganalisis, menyusun sebagian data dan kemudian memberikan penjelasan tentang arti data tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari penelitian terkait dengan Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

1.8.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah memberikan batasan studi kualitatif, dalam penelitian kualitatif peneliti menetapkan fokus sebagai pengganti masalah dan didasarkan pada urgensi isu dan fenomena yang terjadi. Spradley dalam (Wekke Suardi, 2019:43) mengatakan fokus adalah domain yang terkait dengan pendekatan situasi sosial. Penelitian ini menggunakan perspektif *governance* dengan teori *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash (2008), yaitu komponen proses *collaborative* yang terdiri dari *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding*, dan *intermediate outcomes*. Proses *collaborative* ini dilihat secara konten dan konteks sebagai alat untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata alam Siosar, Kabupaten

Karo, Sumatera Utara. Penelitian ini mengambil tema secara umum, karena *collaborative governance* dalam pariwisata juga dilakukan di kota dan negara lain.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian berguna untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang terjadi dari objek yang diteliti. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Siosar, Pertibi Lama, Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Gambar 1.15 Peta Wilayah Kabupaten Karo



Sumber: Kabupaten Karo, 2021

Siosar merupakan salah satu kawasan baru di Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Adapun yang menjadi ketertarikan bagi peneliti terhadap lokasi penelitian ini dikarenakan Siosar merupakan daerah wisata alam yang baru, kawasan hutan lindung, dan daerah agrowisata yang berada di lokasi pengungsian Sinabung.

1.8.4 Fenomena Pengamatan

Fenomena pengamatan adalah fakta yang ditemui di lapangan atas dasar permasalahan dan isu terkait proses *collaborative governance* pengembangan pariwisata. Fenomena pengamatan dibagi menjadi Fenomena, Sub Fenomena dan Operasionalisasi (lihat tabel 3.1). Fenomena merupakan turunan dari tujuan penelitian. Sub Fenomena merupakan turunan dari teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Operasionalisasi merupakan aspek-aspek spesifik yang akan ditinjau lebih dalam di lapangan oleh peneliti. Berikut adalah fenomena pengamatan dalam penelitian ini.

Tabel 1.3: Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Operasionalisasi
Pariwisata		
Pariwisata	Komponen Pariwisata	1. <i>Attractions</i> (daya tarik) 2. <i>Accessibility</i> (Aksesibilitas) 3. <i>Accommodation</i> (Akomodasi) 4. <i>Amenities</i> (Amenitas) 5. <i>Ancillary Service</i> (Pelayanan Tambahan)
	Pengembangan Pariwisata	Perubahan yang terjadi pada daerah wisata
Proses Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata		
<i>Face to face dialogue</i>	Komunikasi antar <i>stakeholder</i>	1. Interaksi secara tatap muka 2. Negoisasi dalam mencapai kesepakatan bersama 3. Alat untuk membangun komitmen dan kepercayaan dalam proses kolaborasi.
<i>Trust Building</i>	Adanya rasa kepercayaan antar <i>stakeholder</i>	1. Membangun kepercayaan antar pemerintah dengan pemerintah 2. Membangun kepercayaan antar pemerintah dengan masyarakat 3. Membentuk kepercayaan dalam jangka pendek dan panjang.
<i>Commitment to Process</i>	Komitmen antar <i>stakeholder</i> dalam menjalankan kolaborasi.	1. Membangun kesadaran adanya saling ketergantungan 2. Saling memiliki kebersamaan dalam proses kolaborasi 3. Keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama
<i>Shared Understanding</i>	Membangun visi, misi dan pemahaman antar <i>stakeholder</i>	1. Misi yang jelas 2. Definisi masalah umum 3. Identifikasi nilai-nilai umum
<i>Intermediate Outcomes</i>	Hasil yang diharapkan dari adanya kolaborasi baik jangka pendek dan jangka panjang.	1. Cita-cita jangka pendek dan Panjang 2. Rencana strategis 3. Bergabung dalam pencarian fakta
Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Collaborative Governance	<i>Networked Structure</i>	1. Keterkaitan antara elemen satu dengan elemen lainnya. 2. Tidak membentuk hierarki
	<i>Commitment to a Common Purpose</i>	1. Komitmen yang dimiliki dalam mencapai tujuan
	<i>Trust Among the Participants</i>	1. Sikap saling percaya antar <i>stakeholders</i>
	<i>Governance</i>	1. Proses interaksi yang dilakukan antara pemerintah dan warga

	<i>Access to authority</i>	1. Standar dan ketentuan prosedur dalam menjalankan kolaborasi
	<i>Distributive Accountability</i>	1. Pembagian tanggung jawab sehingga semua <i>stakeholders</i> memiliki tanggung jawab.
	<i>Information Sharing</i>	1. Kemudahan akses yang dapat diterima dalam mencapai informasi
	<i>Access to Resources</i>	1. Ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya.

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

1.8.5 Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan yang dijadikan responden, maupun yang berasal dari dokumen, baik dalam bentuk statistik/ dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Data diperoleh dengan nilai satu atau lebih variabel dalam sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah data atau informasi yang berasal dari sumber asli, diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi.
- b) Data sekunder adalah data atau informasi yang relevan dan didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya terdiri dari dokumen-dokumen, baik pemerintah maupun swasta. Data sekunder juga dapat diperoleh dari majalah, publikasi, hasil studi, survei dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.8.6 Pemilihan Informan

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Prosedur pengambilan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* yaitu mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai hingga diperoleh sejumlah informan yang diperlukan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung dan mengetahui bagaimana upaya serta usaha dalam meningkatkan pariwisata Siosar. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4: Tabel Informan Penelitian

Informan Penelitian			
Key Informan			
No	Nama Informan	Jabatan/Posisi	Instansi
1	Rizal Berutu Amd, S, Tr	Staff Bidang Promosi dan Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karo
Informan Utama			
1	Yani Ginting	Kepala Desa Suka Meriah	Desa
2	Sarman Tarigan, ST	Pemilik Zia Coffee	Pihak Swasta
3	Syahrul	Staff Taman Emisura	Pihak Swasta
4	Ovie	Staff Kebun Madu Efi	Pihak Swasta
5	Rocky Tarigan	Masyarakat Lokal	Desa
6	Sastra Ginting	Masyarakat Lokal	Desa
Informan Tambahan			
1	Eva Angela, S.SS, MM.	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karo

Sumber: Peneliti 2022

Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan orang). Terdiri dari pemerintah ada dua (2), ada tiga (3) orang dari pihak swasta dan ada dua (2) orang dari masyarakat lokal.

1.8.7 Instrumen Penelitian

Penelitian pada Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Alam Siosar di Kabupaten Karo, instrument utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden. Selain itu, pedoman observasi yang berisikan pengamatan keadaan ataupun kondisi yang berkaitan dengan proses *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata alam Siosar di Kabupaten Karo, serta pedoman dokumentasi yang berisikan data-data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Tujuan dari instrumen dalam penelitian ini secara khusus untuk memudahkan penggalan data yang lebih kaya dan mendalam.

1.8.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan sebuah proses interaksi yang terjadi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau sumber

informasi yang dilakukan dengan komunikasi langsung. Dimana pewawancara dengan sumber informasi melakukan pertemuan secara tatap muka dan bertanya langsung mengenai objek yang akan diteliti oleh pewawancara (Yusuf, 2017). Wawancara yang dilakukan terkait dengan *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

b. Teknik Observasi

Observasi disebutkan oleh Asyari (1983) merupakan pengamatan yang dilakukan secara khusus pada masalah dalam penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada penelitian yang dilakukan. Observasi pada penelitian yaitu melihat kondisi proses kolaborasi yang berjalan dalam mengembangkan pariwisata alam Siosar, Kabupaten Karo (Samsu, 2017:97).

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pencarian data mengenai hal atau variabel yang berbentuk tulisan, gambar, karya monumental seseorang, buku, transkrip, dan majalah yang bersifat stabil dan akurat mengenai situasi dan keadaan sebenarnya sehingga dapat dianalisis secara berulang tanpa adanya perubahan pada hasil penelitian. Dokumen yang dibutuhkan yaitu gambar, tulisan, struktur, dan organisasi dan segala yang berhubungan dengan Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Samsu, 2017:99).

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengacu pada sumber referensi, misalnya jurnal ilmiah, buku, karya ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan yang masalah diteliti.

1.8.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan teknik kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Bodgan dalam (Wekke Suardi, 2019:91)

Miles dan Huberman (1984 dalam (Wekke Suardi, 2019:93) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing verification*, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menginterpretasikan data atau informasi yang di dapat dari catatan lapangan/observasi serta hasil wawancara mendalam terhadap subjek penelitian atau informan. Mereduksi artinya mencari tema

dan pola, menulis dan merangkum catatan lapangan, memilih hal-hal yang pokok, mengidentifikasi serta memfokuskan yang penting, hal ini akan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan dengan pengelompokan atau kategori. Melalui penyajian data maka akan dapat dengan mudah untuk memahami apa yang terjadi, sehingga dapat merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya, tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dimana peneliti menarik kesimpulan dari temuan yang sudah ada. Peneliti melihat kembali data yang sudah di reduksi guna mempertimbangkan makna dari data yang telah di analisis dengan implikasinya berdasarkan pertanyaan pada perumusan masalah.

1.8.10 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan validitas dan realibilitas data hasil penelitian. Validitas data adalah derajat ketetapan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan fenomena sesungguhnya yang terjadi di lapangan, sedangkan realibilitas data adalah derajat konsistensi atau stabilitas data yang dihasilkan dari penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan standar tertentu dalam menguji keabsahan data penelitian yang telah dilakukan. Dalam memeriksa

keabsahan data data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono (2013:330 dalam Lubis 2020:35) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Triangulasi Sumber

Dalam triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Peneliti melakukan wawancara mengenai Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Pariwisata Alam Siosar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara